

BAB 1

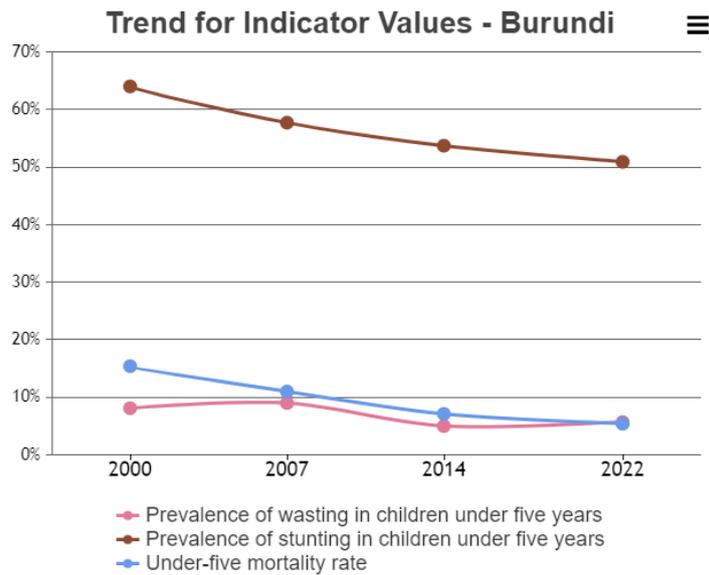
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Isu kelaparan merupakan tantangan global saat ini. Hal ini terlihat pada agenda 2030 yang mencantumkan “*Zero Hunger*” sebagai suatu tujuan yang hendak dicapai. Isu kelaparan dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti kemiskinan, bencana alam, perubahan iklim, dan konflik. Salah satu konflik yang dapat terjadi pada lingkup domestik ialah krisis politik yang merupakan suatu keadaan negara yang mengalami instabilitas di dalamnya yang disebabkan oleh hilangnya kepercayaan masyarakat atau anggota partai terhadap pemimpin mereka. Krisis politik juga dapat muncul karena terdapat tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pemimpin suatu negara atau digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan oleh pihak lainnya. Krisis politik juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor lain yaitu seperti perbedaan ideologi politik, faktor budaya, potensi politik, ekonomi dan adanya kesenjangan sosio-ekonomi yang tinggi.

Akibat adanya krisis politik yang terjadi di suatu negara, dapat mempengaruhi keamanan masyarakat. Salah satu keamanan masyarakat yang dipengaruhi ialah kelaparan. Kelaparan umumnya dipahami sebagai sebuah situasi seseorang yang sulit untuk memperoleh asupan yang pada akhirnya menyebabkan kekurangan makanan. Menurut FAO, kekurangan makanan atau kekurangan gizi bermakna bahwa seseorang mengonsumsi kurang dari 1.800 kalori per harinya. Persepsi mengenai kelaparan yang dianggap mengancam keamanan manusia dapat dilihat pada banyaknya angka kematian, jumlah ketersediaan makanan, pola konsumsi makanan atau status gizi masyarakat (FAO, 2008).

Salah satu wilayah yang rentan terhadap isu kelaparan ialah Burundi yang merupakan salah satu negara yang berada di Afrika Tengah. Menurut Global Hunger Index, isu kelaparan Burundi saat ini tergolong mengkhawatirkan (Global Hunger Index, 2022).



Gambar 1 Grafik Prevalensi *Stunting* dan *Wasting* Burundi

Sumber: (Global Hunger Index, 2022)

Berdasarkan pada grafik tersebut, terlihat bahwa anak-anak di Burundi memiliki persentase yang tinggi pada kurangnya berat badan yang pas yang mencerminkan kekurangan gizi. Kemudian, tingginya *stunting* yang dialami oleh anak-anak Burundi yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis (Global Hunger Index, 2022). Kekurangan gizi dalam hal ini disebabkan oleh kurangnya asupan. Hal ini pun menjadi salah satu bagian dari isu kelaparan dimana masyarakat tidak dapat mencukupi asupannya untuk menjalani hidup sehat. Isu kelaparan yang terjadi di wilayah Burundi didorong oleh terjadinya konflik politik dimana konflik tersebut telah terjadi sejak lama (FAO, 2020). Hal ini terlihat dari kudeta yang terjadi setelah Burundi mencapai kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1962. Kudeta yang terjadi di Burundi berawal dari adanya perang saudara di Burundi. Peristiwa ini bermula sejak terjadinya polarisasi antara suku Hutu dan Tutsi pada masa kolonialisme Belgia yang pada awalnya suku Tutsi dan Hutu yang merupakan kelompok sosial masyarakat terpolarisasi oleh reformasi administrasi yang dibentuk oleh koloni Belgia dan memberikan posisi pemerintahan pada etnis Tutsi dan etnis Hutu pun dipinggirkan (Nkurunziza, 2018).

Pada akhirnya polarisasi tersebut berlanjut meski Burundi telah terbebas dari koloninya. Akibatnya, terjadi perebutan kekuasaan antara etnis Tutsi dan Hutu dengan melakukan upaya kudeta kepemimpinan. Hal tersebut dapat dilihat pada upaya penggulingan pemerintahan oleh etnis Tutsi dengan membunuh Melchior Ndadaye yang merupakan presiden pertama yang terpilih secara demokratis sehingga dapat menguasai sistem pemerintahan Burundi (Addis Ababa University, 2018). Kudeta tersebut memicu perang saudara antara suku Tutsi dan Hutu yang menimbulkan korban sekitar 300.000 orang. Konflik berkepanjangan yang terjadi di Burundi membuat masyarakat internasional berinisiatif untuk mengadakan perundingan dalam upaya resolusi konflik Burundi yang menghasilkan beberapa perjanjian, yaitu *the Convention of Government* yang dilaksanakan pada tahun 1994, *The Arusha Peace and Reconciliation Agreement* yang ditandatangani pada tahun 2000, dan *The Burundi Power-Sharing Agreement* yang ditandatangani pada tahun 2004 (Addis Ababa University, 2018).

Meski telah terdapat upaya penyelesaian oleh aktor eksternal, namun konflik internal terus terjadi. Kemudian diperparah dengan keputusan Presiden Nkurunziza yang memutuskan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum tahun 2015 yang mana hal ini bermakna bahwa Presiden Nkurunziza akan menjabat pada periode ke-tiga. Hal ini mendapat tentangan dari sebagian elit pemerintahan dan kelompok masyarakat yang menimbulkan terbentuknya kelompok pemberontak. Kemudian, dalam melakukan pemberontakan, terjadi kudeta yang dipimpin oleh seorang jenderal angkatan militer Burundi, tetapi upayanya gagal. Selanjutnya, pihak Pengadilan Konstitusi menyatakan bahwa Presiden Nkurunziza dapat mencalonkan diri kembali yang semakin memperburuk situasi. Meskipun telah dilaksanakan pergantian pemimpin pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2020, namun konflik krisis politik terus berjalan. Hal ini disebabkan oleh sudah tidak adanya kepercayaan terhadap pemerintahan Burundi sehingga para pemberontak terus melakukan aksinya. Dengan konflik krisis politik yang terus terjadi, mempengaruhi kehidupan masyarakat internal Burundi. Hal ini memicu krisis pangan yang terjadi dan mendorong terjadinya *stunting* dan kelaparan para penduduknya.

Burundi yang merupakan salah satu negara termiskin yang memiliki PDB terendah ke-dua di dunia berdasarkan laporan pada laman WFP (WFP, n.d.). Mengacu pada data World Bank, dilaporkan bahwa Hal ini terlihat pada grafik PDB per kapita Burundi hanya sebesar US\$521,617 ribu (World Bank, n.d.). Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Burundi hanya memperoleh 89.891 *franc* per tahunnya. Puncak konflik pada tahun 2015 juga memicu terjadinya resesi ekonomi Burundi yang mana hal ini terlihat dari perekonomian yang mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian, sekitar 70-80% masyarakat Burundi hidup dalam kemiskinan yang merata di wilayah pedesaan Hutu, Tutsi, dan Twa (BTI, 2020). Hal ini menyebabkan masyarakat Burundi rentan kelaparan dan sebesar 52% anak-anak di bawah usia 5 tahun mengalami *stunting* berdasarkan laporan WFP (WFP, n.d.).

Kemudian, pada tahun 2020 seluruh negara mengalami guncangan akibat adanya pandemi Covid-19. Hal ini semakin memperparah situasi masyarakat Burundi. Akibat adanya guncangan pandemi Covid-19 ini, pemerintah Burundi menerapkan beberapa kebijakan seperti pelaksanaan karantina dan menutup perbatasan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses perekonomian masyarakat khususnya yang bergantung pada sektor buruh dan perdagangan dengan negara lainnya (FAO, 2020). Kebijakan pembatasan tersebut menyebabkan menurunnya pendapatan pada lintas-batas dan penurunan impor pada suplay makanan (FEWS NET, 2021). Hal ini mengakibatkan timbulnya kerawanan pangan di kalangan masyarakat yang mengakibatkan rentannya kelaparan dan *stunting* pada masyarakatnya. Menurut data FAO, pada tahun 2019 saat pandemi Covid-19 melanda, tercatat bahwa terdapat 1.7 juta masyarakat burundi mengalami kerawanan pangan akut. Sementara 87 ribu anak-anak mengalami malnutrisi, dan 45 ribu anak-anak lainnya mengalami malnutrisi akut (FAO, 2020).

Kemudian, perekonomian Burundi yang bergantung pada sector pertanian juga mengalami tantangan. Hal ini terlihat bahwa pada tahun 2020 terjadinya bencana alam yang didorong oleh perubahan iklim. Bencana seperti banjir dan degradasi lahan memperburuk system pertanian Burundi menyebabkan musim pertanian yang tidak dapat diprediksi. Selain

permasalahan mengenai degradasi lahan, pada tahun 2020 terdapat kembalinya pengungsi Burundi dari negara lainnya yang mendorong kelangkaan lahan. Dalam hal ini, masyarakat yang kembali mendapati lahannya telah dimiliki pihak lainnya. Hal ini semakin mendorong rumah tangga hidup dalam kemiskinan dan tidak dapat memenuhi ketersediaan pangan dalam rumah tangganya. Kelangkaan lahan ini diakibatkan oleh padatnya jumlah penduduk Burundi sebanyak 12 juta orang dengan luas wilayah yang kecil dan bergantungnya perekonomian pada sektor pertanian. Kelangkaan tersebut mendorong masyarakat Burundi kehilangan mata pencahariannya dan menimbulkan konflik kepemilikan tanah.

Terkait isu kelaparan yang terjadi, mendorong pemerintah di dunia untuk mendorong suatu perubahan yang akan mengakhiri kemiskinan dan kelaparan yang merupakan hal yang saling terkait dalam suatu agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Terkait isu kerawanan pangan di Burundi, bertentangan dengan poin “*Zero Hunger*” yang tertera dalam SDGs poin 2. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan sebuah agenda global yang dirancang pada tahun 2015 sebagai pengganti dari *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang hendak dicapai dalam upaya mendorong kemakmuran manusia dan bumi. Salah satu tujuan dalam SDGs ialah “*Zero Hunger*” yang tercantum pada poin 2. Penentuan poin-poin dalam SDGs khususnya poin 2 dilatar belakangi oleh terdapatnya kesejahteraan dan kemajuan yang tidak merata (UNDESA, n.d.). Sehingga, pembentukan poin-poin dalam SDGs berupaya untuk mendorong negara-negara di dunia dalam prospek pembangunan yang berkelanjutan dalam agenda 2030. Pada poin ke-2 SDGs “*Zero Hunger*” terdapat upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat yang kelaparan dan mengalami kekurangan gizi pada makanan yang bergizi. Hal ini sejalan dengan penegasan dari para pemimpin negara di dunia yang menjadi partisipan dalam *Conference on Sustainable Development* (Rio+20) yang diadakan pada tahun 2012 bahwa setiap orang berhak atas kecukupan pangan dan terbebas dari kelaparan. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal PBB menyerukan kepada tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat

sipil, komunitas, dan sektor swasta untuk mengakhiri kelaparan dan mengatasi kekurangan gizi.

Komitmen dalam implementasi SDGs tidak hanya dilakukan oleh aktor negara saja, tetapi berlaku untuk seluruh entitas dalam masyarakat dunia. Salah satu aktor yang mendorong pelaksanaan SDGs khususnya pada poin 2 “*Zero Hunger*” ialah *World Food Programme*. WFP merupakan salah satu organisasi internasional di bawah naungan *United Nations* atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak pada bidang bantuan kemanusiaan dari sektor pangan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam proses pemulihan dari konflik, bencana, ataupun perubahan iklim (WFP, n.d.). WFP berfokus pada kegiatan dalam meningkatkan nutrisi pada anak-anak dan wanita, mendukung petani kecil dalam meningkatkan produktivitasnya, serta membantu bangsa dan negara dalam persiapan menghadapi guncangan iklim. Selain itu, WFP juga kerap mengambil peran dalam kondisi konflik dimana WFP memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terdampak dan sebagai upaya untuk membuka jalan menuju perdamaian dan menciptakan stabilitas (WFP, n.d.). Dalam menjalankan program yang mendukung pelaksanaan SDGs, WFP tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah negara terkait, tetapi juga dengan agensi PBB, *private sector*, lembaga *think tank*, dan NGO dalam memobilisasi sumber daya dan menelusuri solusi inovatif yang tepat, dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan bantuan. Dalam merespon isu kelaparan di Burundi, WFP menjalankan beberapa program yang diharapkan dapat meminimalisir isu kelaparan dan *stunting* pada masyarakat Burundi.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik pembahasan. Terkait dengan peran organisasi internasional khususnya *World Food Programme* (WFP), dalam artikel yang ditulis oleh Hariani (Hariani, 2017) yang menyatakan bahwa WFP mampu mengurangi krisis yang terjadi akibat adanya konflik politik yang menimbulkan kemiskinan serta memicu kekurangan gizi pada anak-anak dan ibu hamil melalui programnya. Kemudian, Ndaru dan Defrina (Ndaru & Defrina, 2005) berargumen bahwa diperlukan bantuan

jangka panjang yang disalurkan WFP sebagai solusi yang tepat. Hal ini pun di dukung oleh argument Dewanti (Dewanti, 2018) yang menyatakan bahwa WFP sebagai salah satu organisasi internasional memiliki peran dalam mengurangi resiko kerawanan pangan di daerah yang rawan.

Bencana alam yang terjadi secara bersamaan akan membentuk situasi rawan pangan yang lebih kompleks seperti yang terjadi di Afrika Tenggara pada tahun 1896 pada tahun 1896. Dalam artikel yang ditulis oleh Pribyl, dkk. (Pribyl, Nash, Klein, & Endfield, 2019) menyatakan bahwa isu kelaparan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kekeringan yang melanda, tetapi juga dapat diperparah oleh serangan belalang dan wabah penyakit yang melanda hewan ternak yang memicu gagal panen secara besar-besaran dan mengakibatkan kelaparan. Pembahasan mengenai krisis pangan yang disebabkan oleh kondisi iklim yang menyebabkan terjadinya siklus kekurangan pangan dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Mohamed (Mohamed, 2017) dimana penulis berargumen bahwa kondisi ketahanan pangan sangat berhubungan dengan kekurangan pangan dan kelaparan yang berulang yang disebabkan oleh kekeringan yang berulang. Kekeringan El Niño yang terjadi menyebabkan penurunan tajam dalam ketahanan pangan yang memicu kegagalan produksi. Selain karna faktor alam, Cameron (Cameron, 2016) menyatakan dalam tulisannya bahwa kerawanan pangan juga dapat terjadi karena pembentukan kebijakan yang tidak tepat, seperti kebijakan kolektivisasi misalnya.

Isu kelaparan di Afrika telah terjadi sejak lama dan terus mengalami peningkatan. Hal ini dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh Otekinrin, dkk. (Otekinrin, Otekinrin, Fasina, Omotayo, & Akram, 2020) yang menyatakan bahwa upaya mengakhiri kelaparan global khususnya kelaparan di Afrika sangat penting untuk dilakukan demi mencapai pembangunan berkelanjutan. Kelaparan sebagai tantangan global juga didukung oleh argumen Pardede (Pardede, 2020) yang dalam tulisannya menyatakan bahwa kerawanan pangan tidak hanya terjadi di wilayah negara berkembang, tetapi juga negara maju pun dapat mengalami kerawanan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok masih mengalami permasalahan terkait pangan yang cukup

signifikan karena ketersediaan pangan saja tidak cukup menjadi indikator untuk menilai suatu negara telah mampu mencapai tingkat ketahanan pangannya.

Selain itu, tingkat ketahanan pangan di Afrika Selatan berkaitan dengan sektor air dan energi yang dibahas dalam tulisan Gulati, dkk. (Gulati, Jacobs, Jooste, Naidoo, & Fakir, 2013) dimana penulis berargumen bahwa diperlukan solusi berkelanjutan yang integratif untuk memastikan ketahanan pangan dimana keterkaitan antara air, energi, dan pangan sangat penting bagi pengembangan masa depan yang berkelanjutan dan aman bagi semua negara dan wilayah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa apabila energi atau air mengalami kenaikan harga, maka pangan pun akan mengalami kenaikan harga yang dapat memicu kerawanan pangan. Kemudian, Kah (Kah, 2017) dalam tulisannya berpendapat bahwa terdapat keterkaitan antara konflik yang terjadi dengan krisis pangan dimana dalam hal ini, konflik yang terjadi memperburuk situasi kerawanan pangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa konflik tersebut mengganggu stabilitas pertanian yang pada akhirnya menyebabkan terbatasnya pasokan dan kenaikan harga pangan.

Argumen ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Arlyan (Arlyan, 2018) yang menunjukkan bahwa konflik domestik dapat terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil yang pada akhirnya dapat mengganggu sistem produksi dan pertumbuhan ekonomi serta dapat mengganggu ketahanan pangan dan gizi serta sebaliknya. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi masyarakat juga harus ditingkatkan dimana hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Prosekov dan Ivanova (Prosekov & Ivanova, 2018) yang berargumen bahwa terlepas dari semua upaya bersama, jumlah orang yang kekurangan gizi dan kelaparan di dunia terus bertambah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hal ini dikarenakan dengan pertumbuhan populasi yang stabil, kemungkinan kelaparan untuk diberantas pada tahun 2050 dipertanyakan.

Kemudian, Afrika yang memang sudah rentan mengalami isu kerawanan pangan dinilai tidak siap untuk mencapai target pada SDGs poin 2 “*Zero Hunger*” selaras dengan argumen yang dijelaskan oleh Otekinrin (Otekinrin,

2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan kenaikan jumlah orang yang mengalami kelaparan tiap tahunnya yang juga diperparah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, kerugian pra dan pasca panen yang parah karena hama konflik, serta covid-19 mempersulit pencapaian target SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Dalam mendorong pencapaian SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”, diperlukan stabilitas domestik yang mana Galabada (Galabada, 2022) berargumen bahwa institusi domestik memiliki pengaruh dalam pencapaian SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan yang baik dan stabilitas politik dapat mendukung pencapaian SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Namun dengan kemunculan Covid-19, cukup mempersulit pencapaian ketahanan pangan dalam mendorong implementasi SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Hal ini sejalan dengan artikel yang dijelaskan oleh Udmale, dkk (Udmale, Pal, Szabo, Pramanik, & Large, 2020) dimana penulis berargumen bahwa rantai pasokan global mengalami hambatan saat terjadinya Covid-19 yang berdampak pada penurunan persediaan pangan di negara-negara yang rentan. Penelitian ini menunjukkan bahwa gangguan dalam rantai pasokan dapat sangat mengancam ketahanan pangan, terutama pada orang miskin yang mempengaruhi kemajuan pencapaian SDG poin 2 “*Zero Hunger*” sehingga bantuan kemanusiaan kemungkinan besar akan diperlukan untuk membantu mengurangi dampak terburuk dari terjadinya pandemi.

Berdasarkan tinjauan pustaka pada literatur tersebut di atas, terlihat bahwa belum terdapatnya penelitian terdahulu yang secara spesifik membahas mengenai bantuan pangan yang disalurkan oleh *World Food Programme* (WFP) dalam isu kelaparan yang terjadi di Burundi sebagai implementasi dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 2 “*Zero Hunger*”. Mengenai peran WFP, dalam artikel Hariani (Hariani, 2017) berfokus pada peran WFP dalam krisis yang terjadi di Sierra Leone. Sementara dalam tulisan Ndaru dan Defrina (Ndaru & Defrina, 2005) berfokus pada peran WFP dalam isu kelaparan yang terjadi di Niger dan Dewanti (Dewanti, 2018) berfokus pada peran WFP dalam mengurangi resiko kerawanan pangan di NTB. Pembahasan pada ketiga artikel tersebut berfokus pada peran *World Food Programme* (WFP) dalam menanggulangi isu kelaparan yang terjadi di daerah yang rentan.

Kemudian, penyebab terjadinya kelaparan dibahas dalam tiga penelitian terdahulu, seperti kelaparan yang terjadi di Afrika Tenggara yang didorong oleh terjadinya bencana alam dibahas oleh Pribyl, dkk. (Pribyl, Nash, Klein, & Endfield, 2019). Hal serupa juga dibahas oleh Mohamed (Mohamed, 2017) yang berfokus pada ketahanan pangan di Ethiopia yang disebabkan oleh kekeringan yang berulang. Namun, selain disebabkan oleh bencana alam, kerawanan pangan juga dapat disebabkan oleh pembentukan kebijakan yang tidak tepat seperti yang dijelaskan oleh Cameron (Cameron, 2016) yang berfokus pada kerawanan pangan yang terjadi di Kazakh.

Pembahasan mengenai isu kelaparan yang merupakan suatu tantangan yang harus segera diatasi dibahas dalam empat penelitian terdahulu. Terkait kelaparan yang terjadi di Afrika dijelaskan dalam tulisan Otekunrin, dkk. (Otekunrin, Otekunrin, Fasina, Omotayo, & Akram, 2020) yang menekankan bahwa isu kelaparan tersebut merupakan tantangan global. Hal ini didukung oleh Pardede (Pardede, 2020) yang dalam tulisannya berfokus pada ketahanan pangan yang terjadi di Tiongkok yang menunjukkan bahwa negara maju pun masih mengalami tantangan ketahanan pangan. Kemudian, Gulati, dkk. (Gulati, Jacobs, Jooste, Naidoo, & Fakir, 2013) menganalisis ketahanan pangan di Afrika dalam kaitannya dengan sektor energi. Selain berkaitan dengan sektor energi, ketahanan pangan juga berkaitan dengan konflik seperti yang terjadi di Nigeria dan Cameroon yang dibahas oleh Kah (Kah, 2017).

Hal ini sejalan dengan krisis pangan yang terjadi di Venezuela yang berakar dari stabilitas politik dan krisis ekonomi yang terjadi secara bersamaan yang dibahas oleh Arlyan (Arlyan, 2018). Sehingga stabilitas ekonomi masyarakat juga harus ditingkatkan dimana hal ini sejalan dengan artikel yang ditulis oleh Prosekov dan Ivanova (Prosekov & Ivanova, 2018) yang berfokus pada sulitnya akses makanan oleh masyarakat di sebagian besar negara berkembang. Pencapaian SDGs di Afrika yang dinilai cukup sulit dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Otekunrin (Otekunrin, 2021) yang berfokus pada situasi di Afrika yang kurang mendukung pencapaian target SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Dalam mendorong pencapaian SDGs poin 2 “*Zero Hunger*” juga perlu didukung oleh kestabilan domestik dimana hal ini dibahas oleh

Galabada (Galabada, 2022). Kemudian, Udmale, dkk (Udmale, Pal, Szabo, Pramanik, & Large, 2020) juga menjelaskan bahwa pencapaian SDG poin 2 “*Zero Hunger*” terhambat akibat terjadinya Covid-19 yang mengganggu rantai pasokan pangan.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam terkait bantuan pangan yang disalurkan oleh *World Food Programme* (WFP) dalam isu kelaparan yang terjadi di Burundi sebagai upaya mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 2 “*Zero Hunger*”. Mengenai bantuan pangan yang disalurkan oleh WFP di Burundi, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran WFP dalam isu kelaparan tersebut dalam konsep peran organisasi internasional yang dijelaskan oleh Clive Archer sebagai salah satu aktor internasional yang mengadopsi nilai-nilai SDGs khususnya poin 2 “*Zero Hunger*”.

I.2 Rumusan Masalah

Isu kelaparan yang menjadi ancaman bagi masyarakat Burundi akibat adanya krisis politik berkepanjangan yang terjadi juga diperparah dengan adanya wabah pandemic Covid-19 yang terjadi. Dalam hal ini urgensi kesejahteraan penduduk Burundi menjadi sesuatu yang krusial. Negara Burundi yang merupakan salah satu negara miskin di dunia dengan GDP terendah kedua di dunia memiliki penduduk yang mencapai 12 juta jiwa (WFP, n.d.). Sehingga penanganan kelaparan di Burundi harus segera ditangani yang mana hal ini sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam SDGs poin 2 “*Zero Hunger*”. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin meneliti “**bagaimana peran WFP dalam merespons isu kelaparan yang terjadi di Burundi dalam mendukung pencapaian poin 2 SDGs “*Zero Hunger*”?**”

I.3 Tujuan Penelitian

a. Tujuan Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran *World Food Programme* (WFP) dalam menanggulangi isu kelaparan di Burundi sebagai

implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 2 “*Zero Hunger*”

b. Tujuan Akademis

Penelitian ini dapat menjadi bahan tinjauan dan analisis bagi mahasiswa studi Ilmu Hubungan Internasional terkait peran *World Food Programme* (WFP) dalam isu kelaparan dalam penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) poin 2 “*Zero Hunger*” dalam konsep peran organisasi internasional oleh Clive Archer.

I.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap penelitian yang akan dilakukan di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan mengenai peran *World Food Programme* (WFP) dalam menanggulangi isu kelaparan di Burundi.

b. Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data dan informasi yang dapat digunakan dalam studi Hubungan Internasional, khususnya mengenai bantuan pangan yang disalurkan oleh *World Food Programme* (WFP) dalam menanggulangi isu kelaparan di Burundi.

I.5 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang fenomena sosial yang diangkat. Pada bagian ini, penulis mengulas mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang menjadi salah satu pilar pembangunan berkelanjutan yang diadopsi oleh *World Food Programme* (WFP) dalam menjalankan programnya. Penulis juga menjelaskan bagaimana signifikansi isu kelaparan di Burundi yang menjadi tantangan global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam SDGs. Pada bagian ini, penulis juga menuliskan 14 penelitian terdahulu sebagai landasan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu pada bagian ini terkait bantuan pangan WFP dalam merespon isu ketahanan pangan, isu kelaparan dan

ketahanan pangan di Afrika serta pengaruh konflik terkait ketahanan pangan di suatu negara. Kemudian, pada Bab I ini, penulis juga menuliskan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai konsep yang digunakan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs), *food security*, dan peran organisasi internasional. Kemudian, pada bagian ini terdapat kerangka penelitian yang akan memudahkan dalam pemahaman alur pembahasan penelitian ini.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini dimana penulis menggunakan metode kualitatif dalam memaparkan hasil analisa sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan teknik mengumpulkan data serta teknik analisa data. Dalam bagian ini, penulis juga mencantumkan table rencana waktu penelitian sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Bab IV : *Sustainable Development Goals* (SDGs) Poin 2 “Zero Hunger” dan Isu Kelaparan

Bagian ini menjelaskan bagaimana konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya poin 2 “Zero Hunger” sebagai landasan *World Food Programme* (WFP) dalam menjalankan programnya khususnya dalam memberikan bantuan pangan pada negara-negara yang mengalami isu kerawanan pangan serta keterkaitannya dengan isu kelaparan.

Bab V : Peran *World Food Programme* (WFP) dalam Menanggulangi Isu Kelaparan di Burundi

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana peran *World Food Programme* (WFP) dalam menanggulangi isu kelaparan di Burundi dengan menggunakan konsep peran organisasi internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana program-program yang telah dilaksanakan oleh WFP di Burundi tersebut dapat mendukung implementasi poin 2 “*Zero Hunger*” dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Bab VI : Penutup

Bab ini sebagai penutup dari penelitian yang telah dilaksanakan dan berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.